



Dana Tirtayatra Rp 7,7 M di DPRD Buleleng Jadi Temuan

SINGARAJA, NusaBali

Dana Tirtayatra di DPRD Buleleng senilai Rp 7,7 miliar jadi temuan BPK, karena belum jelas pertanggungjawabannya. Imbasnya Buleleng pun kembali mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Informasi yang dihimpun di Singaraja, Senin (27/4),

Bersambung ke Hal 15 Kolom 5

Dana Tirtayatra Rp 7,7 M di DPRD Buleleng...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dana Rp 7,7 miliar itu merupakan dana Tirtayatra dan Purnabakti bagi mantan anggota DPRD Buleleng 1999-2004. Oleh BPK, dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara. Kendati proses hukum kasus tersebut telah inkracht, tapi kerugian negara tidak bisa hilang begitu saja. BPK telah berulang kali mengingatkan agar dana Rp 7,7 miliar ini dikembalikan ke kas negara. Namun, hingga tahun 2014, dana tersebut belum juga dikembalikan.

Ini pula yang memberikan opini WDP bagi pengelola keuangan Pemkab Buleleng. Selain itu, BPK juga menemukan dana Rp 300 juta lebih di Pemkab Buleleng yang tidak jelas pertanggungjawabannya dan diminta dikembalikan ke kas negara. Konon, dana ini muncul ketika Pemkab Buleleng hendak mengambil hak guna usaha

(HGU) atas lahan di wilayah Kecamatan Gerokgak. Dana ini dibayarkan kepada salah satu petugas yang menjaga lahan itu sekitar tahun 2003. Oleh BPK, pembayaran dana itu dianggap menyalahi persedur dan mesti dikembalikan ke kas negara. Ternyata, dana itu juga belum dikembalikan hingga 2014.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana tidak menampik temuan tersebut. Bupati Agus Suradnyana juga mengakui target mertaih opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak tercapai, gara-gara persoalan pengembalian dana-dana yang menyalahi prosedur. "Ya, memang masih jadi temuan, ini akan terus berpengaruh pada opini keuangan daerah. Makanya, saya akan minta agar dana-dana tersebut ditagih, karena ini harus diselesaikan, jangan ini menjadi temuan terus," kata Bupati Agus Suradnyana saat

dikonfirmasi NusaBali sesuai sidang Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Buleleng terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2014 di Singaraja, Senin (27/4).

Sementara itu, Kepala Inspektorat Buleleng, I Putu Yasa, mengatakan sebenarnya dana yang selama ini menjadi temuan BPK telah ditindaklanjuti. Hanya saja, karena terbentur kendala di lapangan, termasuk adanya persepsi bahwa permasalahan Tirtayatra dan Purnabakti itu sudah tuntas di proses hukum, sehingga penagihan dana-dana tidak berjalan mulus. "Karena ini sudah cukup lama prosesnya, nanti akan ada keputusan dari BPK, apakah itu tetap harus dikembalikan atau diputihkan. Nah kita sekarang masih menunggu keputusan itu," terang Putu Yasa. **k19**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 1 dan 15



Dugaan Mark Up Lahan FKOP Undiksha Giliran Rektor dan Mantan Rektor Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali melakukan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan mark up lahan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiskha) Singaraja. Kali ini giliran Rektor Undiksha, Prof dr I Nyoman Jampel, mantan Rektor Prof I Nyoman Sudiana dan Prof I Ketut Seken yang menjalani pemeriksaan di Kejati Bali pada, Senin (27/4).

Pemeriksaan ketiga pejabat di Undiksha ini dilakukan mulai Senin siang oleh empat penyidik, yaitu Akmal Kodrat, Gede Arthana, Wayan Suardi dan Subekan. Namun hingga Senin sore sekitar pukul 16.00 Wita, belum ada tanda-tanda pemeriksaan akan selesai. Beberapa penyidik yang sempat ditemui mengatakan pemeriksaan ketiga pejabat Undiksha ini masih berlangsung.

Informasi yang dihimpun, pemeriksaan terhadap Rektor Undiksha, Prof Jampel, mantan Rektor, Sudiana dan Prof Seken dilakukan karena ketiganya masuk ke dalam tim pembangunan gedung FKOP di Jineng Dalem, Buleleng. Dalam kepanitiaan, Prof Sudiana menjabat sebagai Ketua Tim sementara Jampel dan Prof Seken masuk dalam tim tersebut Kasipenkum dan Humas Kej-

ati Bali, Ashari Kurniawan yang ditemui membenarkan pemeriksaan terhadap ketiga pejabat Undiksha tersebut. Namun ia tidak mau merinci pemeriksaan tersebut termasuk materi dalam pemeriksaan. "Pemeriksaan masih berlangsung," ujar Ashari singkat saat dimintai konfirmasi.

Sebelumnya, penyidik Kejati Bali sudah menetapkan IWS dan INM dalam kasus dugaan mark up lahan FPOK Undiksha. IWS sendiri merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan INM merupakan makelar tanah yang mencarikan lahan untuk pembangunan FPOK Undiksha ini. Meski sudah berstatus tersangka, namun sampai saat ini belum ada penahanan yang dilakukan penyidik.

Selain itu, beberapa pejabat di Pemkab Buleleng juga sudah sempat menjalani pemeriksaan terkait kasus ini. Di antaranya, Kadispenda Buleleng IB Puja Erawan dan Bagian Perencanaan Sugiartawan. Selain pejabat Buleleng, sempat juga diperiksa camat, beberapa dosen, serta panitia pengadaan lahan. Tidak hanya itu, penyidik Kejati juga sempat melakukan pengeledahan di Kampus Undiksha Buleleng dan menyita satu koper penuh berisi dokumen pengadaan lahan FKOP Undiksha di Jineng Dalem. **re**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 5



Bandara Buleleng Cenderung ke Reklamasi

★ Pemprov Minta Rp 2,5 Miliar

Untuk FS Bandara

Anggota DPRD Bali dapil Buleleng setuju reklamasi dilakukan daripada mengorbankan lahan produktif yang mencapai 400 hektare.

DENPASAR, NusaBali

Pembangunan Bandara di Bali Utara (Kabupaten Buleleng) cenderung ke arah reklamasi sehingga tidak menghabiskan lahan produktif. Pemprov Bali telah mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat untuk melakukan feasibility study (FS) pembangunan bandara.

Gubernur Made Mangku Pastika menyampaikan itu disela-sela sidang paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (27/4). "Kalau



Gubernur Pastika

hemat saya lebih bagus dibangun di atas laut. Karena lahan produktif yang dihabiskan tidak ada sama sekali. Kalau tidak di laut ada 400 hektare sawah hilang," ujar Pastika.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sug-

awa Korry (Golkar), dan I Gusti Bagus Alit Putra (Demokrat), Pastika menyebutkan pembangunan bandara ditetapkan di wilayah Buleleng. Pemprov Bali yang telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Buleleng, membentuk tim kecil yang bertugas mempercepat koordinasi dan pembahasan serta kajian. "Masih memerlukan penyempurnaan dari sisi kajian sosial," kata Pastika.

Dikatakan, untuk kajian, Pemprov Bali telah mengusulkan dana ke pusat, sementara soal lokasi tepatnya dimana masih sedang dikaji antara darat dan reklamasi atau pembangunan di atas laut. "Pemerintah Bali telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk kegiatan FS dan kajian kelembagaan yang sedang dibahas dalam Musrenbang Nasional di Bappenas," ujar mantan Kapolda Bali ini.

Dari siapa penggagas FS? Usai sidang paripurna Gubernur Pastika menyebutkan selama ini ada pra FS. "Sekarang sudah

Edisi : Selasa, 29 April 2015

Hal : 13



Sambungan

ada mulai FS dan kita sebagai pemrakarsanya. Memang harus pemerintah provinsi dengan konsorsium BUMN. Karena kajiannya ekonomi dan komersial," ujarnya.

Pemprov Bali berharap pembangunan Bandara Buleleng segera bisa terwujud. Gubernur Pastika sendiri sudah beberapa kali menyampaikan ke Menteri BUMN. Pemprov Bali juga membidik supaya bisa turut serta dalam pengelolaannya, sama dengan penyertaan modal di Jalan Tol Bali Mandara. "Kalau kita ada duit nanti ya saya sarankan kita ikutlah. Nanti kabupaten lain kayak Badung, Buleleng ya ikut di sana. Kalau mau," ucapnya.

Pembangunan Bandara Buleleng ini mendapat penolakan jika memakai lahan produktif. Wakil Ketua Fraksi Pancabaya, I Nyoman Tirtawan dari dapil Buleleng tidak sepakat pembangunan bandara di darat. "Sudahlah di atas laut saja. Karena itu akan menambah pulau kita. Bali sudah kecil dan

padat, reklamasi untuk membangun bandara adalah jalan paling tepat," ujar Tirtawan.

"Saya menolak kalau dibangun di darat, karena lahan produktif akan habis. Mumpung kita ini bicara reklamasi selama ini, saya usulkan reklamasi di Bali Utara saja dan buat pulau baru di Buleleng untuk Bandara Buleleng. Sehingga tidak memakan lahan sawah yang mencapai 400 hektare," kata Tirtawan.

Sedangkan usulan pembangunan Bandara di Buleleng disepakati juga oleh anggota Fraksi Golkar dapil Buleleng Ida Gede Komang Kresna Budhi. "Ketimbang investor melakukan reklamasi di Bali Selatan, mendingan Gubernur mengajak investor membangun Bandara Buleleng saja. Saya angkat topi kalau investor diarahkan ke Buleleng. Ketimbang melakukan kegiatan reklamasi untuk membangun destinasi di Bali Selatan. Sudah padat di sana. Ini yang kita inginkan secepatnya supaya ada pemerataan," kata Kresna Budhi. **nat**

Edisi : Selasa, 28 APRIL 2015

Hal : 13



Utang Karangasem

Melebihi PAD

★ Kini Tambah Utang

Lagi Rp 150 Miliar

Nantinya di akhir era kepemimpinan Bupati Geredeg yang akan usai 21 Juli 2015, mewarisi utang Rp 248 miliar.

Utang itu melebihi PAD Karangasem tahun 2014 yang sebesar Rp 230,9 miliar.

AMLAPURA, NusaBali

Utang Kabupaten Karangasem sebesar Rp 98 miliar yang bersumber dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dan digunakan untuk membangun sejumlah proyek besar seperti Pasar Amlapura Timur, gedung UKM Center dan RSUD tahun 2012, belum lunas terbayar. Kali ini ditambah lagi utang baru sebesar Rp 150 miliar untuk membangun Pasar Amlapura Barat dan dua gedung di RSUD, sehingga total utang Rp 248 miliar.

Hanya saja Bupati Karangasem I Wayan Geredeg yang mengemukakan hal itu, belum menyodorkan kajian teknis, terutama menyangkut kemampuan bayar, dan lamanya utang itu, serta teknis lainnya. Padahal

Pasar Amlapura Timur dan gedung UKM, belum efektif menghasilkan. Geredeg tetap ngotot tambah utang diutarakan di Amlapura, Senin (27/4).

Itu berarti nantinya kepemimpinan Geredeg yang akan berakhir 21 Juli 2015, mewarisi utang Rp 248 miliar. Utang itu melebihi PAD Karangasem tahun 2014 Rp 230,9 miliar.

Alasannya, fasilitas untuk RSUD Karangasem sangat mendesak perlu dikembangkan. Apalagi pasien belakangan ini terus membludak, setelah ada program BPJS dan JKBM. Di samping RSUD telah berstatus BLU (badan layanan umum) sejak tahun 2010.

"Makanya tambah utang Rp 150 miliar lagi. Nantinya untuk

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 8



Sambungan

penataan Pasar Amlapura Barat, agar lebih nyaman, gedungnya berantai III. Juga menambah dua gedung di RSUD, lahan masih luas tersedia," kata Geredeg.

Utang sebelumnya, senilai Rp 98 miliar, teralokasi membangun Pasar Amlapura Timur Rp 29,024 miliar, membangun Gedung RSUD berlantai III Rp 46 miliar, selebihnya teralokasi membangun Gedung UKM Center. "Selain pentingnya penataan pasar, juga perlunya memperluas bangunan RSUD buat meningkatkan pelayanan," tambahnya.

Secara terpisah Direktur RSUD Karangasem I Wayan Suardana mengakui, ada agenda penambahan dua gedung di bagian belakang. Rencananya presentasi keberadaan RSUD

Karangasem Selasa (12/5). "Mengingat ada agenda menambah dua gedung, lahan sudah tersedia, kami belum tahun anggaran yang dibutuhkan," kata Suardana.

Suardana membantah, pembangunan dua gedung itu, besarnya setara dengan gedung sebelumnya berbiaya Rp 46 miliar. "Bukan, gedung sebelumnya kan berlantai III, kali ini gedungnya ukurannya lebih kecil, hanya saja dua gedung," tambahnya.

Disinggung sejauh mana utang-utang telah terbayar terkait pembangunan gedung berlantai III RSUD yang dibiayai atas pinjaman PIP Rp 46 miliar? "Utang itu bukan urusan RSUD, tetapi diurus Pemkab Karangasem, kami hanya sebagai pemakai fasilitas," tambahnya. **k16**

Edisi : Selasa, 28 April 2015

Hal : 8